



**DOKUMEN RENCANA KERJA
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
MENUJU WBK/WBBM**



**UPT BAKUDA
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
WILAYAH KABUPATEN BANGKA**

TAHUN 2022

**DOKUMEN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU
WBK/WBBM UPT.BAKUDA PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
WILAYAH KABUPATEN BANGKA**

A. Dasar.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tanggal 17 Oktober 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di lingkungan Instansi Pemerintah.

B. Maksud dan Tujuan.

1. Rencana kerja pembanguna yang di maksudkan sebagai acuan bagi instansi pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya dalam pembangun Zona Integritas menuju Wilayah bebas Korupsi(WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani(WBBM); dan
2. Memberikan keseragaman pemahaman dan tindakan dalam membangun Zona Integritas menuju WBK/WBBM di lingkungan UPT.BAKUDA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Wilayah Kabupaten Bangka.

C. RENCANA AKSI KOMPONEN PENGUNGKIT.

I. Manajemen Perubahan

Indikator:

a. Tim Kerja

Penyusunan Tim kerja dilakukan dengan memperhatikan hal – hal sebagai berikut:

1. Pembentukan tim untuk melakukan pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM;
2. Penentuan anggota tim selain pimpinan di pilih melalui prosedur/mekanisme yang jelas;

b. Dokumen Rencana pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM Dokumen Rencana Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM penyusunan nya di lakukan dengan memperhatikan hal – hal sebagai berikut:

1. Penyusunan dokumen rencan kerja pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM;
2. Penyusunan dokumen rencana kerja pembangunan zona integritas menuju WBK/WBBM harus memuat target – target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM;
3. Mekanisme atau media untuk mensosialisasikan pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM harus disediakan dan memadai;

- c. Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM dilakukan dengan memperhatikan hal – hal sebagai berikut,
 1. Pelaksanaan kegiatan pembangunan Zona Integritas dan wilayah bebas korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani mengacu pada target yang di rencanakan;
 2. Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM;
 3. Menindaklanjuti hasil monitoring dan evaluasi;
 - d. Perubahan pola pikir dan Budaya Kerja
Perubahan Pola Pikir dan Budaya kerja dilakukan dengan memperhatikan hal – hal sebagai berikut;
 1. Pimpinan menjadi role model dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM;
 2. Penetapan agen perubahan dalam pembangunan zona integritas;
 3. Pelaksanaan Pelatihan Budaya kerja dan pola pikir.
 4. Semua pegawai terlibat dalam pembangunan Zona integritas menuju WBK/WBBM;
1. Implementasi Pembangunan Zona Integritas menuju WBK / WBBM di UPT.BAKUDA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Wilayah Kabupaten Bangka terdiri dari komponen pengungkit Manajemen Perubahan :
Target ;
 - a. Meningkatnya komitmen seluruh jajaran pimpinan dan pegawai unit kerja dalam membangun Zona Integritas menuju WBK/WBBM ;
 - b. Terjadinya perubahan pola pikir dan budaya kerja pada unit kerja UPT.BAKUDA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Wilayah Kabupaten Bangka yang diusulkan sebagai Zona Integritas menuju WBK/WB BM ;
 - c. Menurunnya resiko kegagalan yang disebabkan kemungkinan timbulnya resistensi terhadap perubahan peraturan perundangan undangan.

Bukti pendukung :

2. Surat Keputusan Kepala UPT.BAKUDA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Wilayah Kabupaten Bangka.;
Dokumen Rapat :
 - a. Undangan Rapat
 - b. Absensi
 - c. Dokumentasi
 - d. Notulen
 - e. DII
 - f. Analisa Beban Kerja per fungsi per Job Discription
Pendataan kinerja perorangan(Dokumen SKP Pegawai)

II. Penataan Tata Laksana

Indikator ;

a. Prosedur Operasional tetap (SOP) Pelayanan Pengukuran indikator ini dilakukan dengan mengacu pada kondisi yang seharusnya telah dilakukan, seperti :

- 1) Prosedur operasional tetap mengacu kepada peta proses bisnis instansi ;
- 2) Prosedur operasional tetap telah diterapkan ;
- 3) Prosedur operasional tetap telah dievaluasi

b. E-Office /e-government

Pengukuran indikator ini dilakukan dengan mengacu pada kondisi yang seharusnya telah dilakukan, yaitu

- 1) Sistem pengukuran kinerja berbasis sistem informasi digital,
- 2) Sistem kepegawaian berbasis sistem informasi digital,
- 3) Sistem pelayanan publik berbasis Teknologi informasi digital.

c. Keterbukaan Informasi Publik

Pengukuran indikator ini dilakukan dengan mengacu pada kondisi yang seharusnya telah dilakukan, seperti :

- 1) Kebijakan tentang keterbukaan informasi publik telah diterapkan ;
- 2) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik.

Target ;

- a. Meningkatnya penggunaan teknologi informasi dalam proses penyelenggaraan manajemen pemerintahan di Zona Integritas menuju WBK/WBBM ;
- b. Meningkatnya efisiensi dan efektivitas proses manajemen pemerintahan di Zona Integritas menuju WBK/WBBM ;
- c. Meningkatnya kinerja di Zona Integritas menuju WBK/WBBM.

III. Penataan Sistem Manajemen SDM

Indikator ;

a. Perencanaan Kebutuhan Pegawai sesuai dengan Kebutuhan Pengukuran indikator ini dilakukan dengan mengacu pada kondisi yang seharusnya dilakukan, seperti :

- 1) UPT.BAKUDA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Wilayah Kabupaten Bangka telah membuat rencana kebutuhan pegawai di unit kerjanya dalam hal rasio dengan beban kerja dan kualifikasi pendidikan ;
- 2) UPT.BAKUDA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Wilayah Kabupaten Bangka telah menerapkan rencana kebutuhan pegawai di unit kerjanya ;
- 3) UPT.BAKUDA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Wilayah Kabupaten Bangka telah menerapkan monitoring dan evaluasi terhadap rencana kebutuhan pegawai di unit

kerjanya.

b. Pola Mutasi Internal

Pengukuran indikator ini dilakukan dengan mengacu pada kondisi yang seharusnya dilakukan, seperti :

- 1) UPT BAKUDA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Wilayah Kabupaten Bangka telah menetapkan kebijakan pola mutasi internal;
- 2) UPT BAKUDA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Wilayah Kabupaten Bangka telah menerapkan kebijakan pola mutasi internal ;
- 3) UPT BAKUDA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Wilayah Kabupaten Bangka telah melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kebijakan pola rotasi internal.

c. Pengembangan Pegawai Berbasis Kompetensi Pengukuran indikator ini dilakukan dengan mengacu pada kondisi yang seharusnya dilakukan, seperti :

- 1) Telah melakukan upaya pengembangan kompetensi (capacity building / transfer knowledge) ;
- 2) Terdapat kesempatan/hak yang sama bagi pegawai di unit kerja terkait untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya.

d. Penetapan Kinerja Individu

Pengukuran indikator ini dilakukan dengan mengacu pada kondisi yang seharusnya dilakukan, seperti :

- 1) Telah memiliki penilaian kinerja individu yang terkait dengan kinerja organisasi ;
- 2) ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level di atasnya ;
- 3) Telah melakukan pengukuran kinerja individu secara periodik;
- 4) hasil penilaian kinerja individu telah dilaksanakan/diimplementasikan mulai dari penetapan, implementasi dan pemantauan.

e. Penegakan Aturan Disiplin/Kode Etik/Kode Perilaku Pegawai

Pengukuran indikator ini dilakukan dengan mengacu pada kondisi yang seharusnya dilakukan, seperti pelaksanaan Aturan disiplin/kode etik/kode perilaku telah dilaksanakan / diimplementasikan ;

f. Penegakan Aturan Disiplin/Kode Etik/Kode Perilaku pegawai

Pengukuran indikator ini dilakukan dengan mengacu pada kondisi yang seharusnya dilakukan, seperti pelaksanaan sistem informasi kepegawaian pada unit kerja telah dimutakhirkan secara berkala.

Target ;

- a. Meningkatnya ketaatan terhadap pengelolaan SDM aparatur pada masing-masing Zona Integritas menuju

- WBK/WBBM ;
- b. Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan SDM aparatur pada masing-masing Zona Integritas menuju WBK/WBBM ;
 - c. Meningkatnya disiplin SDM aparatur pada masing-masing Zona Integritas menuju WBK/WBBM ;
 - d. Meningkatnya efektivitas manajemen SDM aparatur pada Zona Integritas menuju WBK/WBBM ;
 - e. Meningkatnya profesionalisme SDM aparatur pada Zona Integritas menuju WBK/WBBM.

IV. Penguatan Akuntabilitas Kinerja Indikator ;

- a. Keterlibatan Pimpinan Dalam penyelenggaraan sistem akuntabilitas kinerja, salah satu komponen yang termasuk di dalamnya adalah dokumen perencanaan strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tersebut. Dokumen ini menyajikan arah pengembangan yang diinginkan dengan memperhatikan kondisi unit kerja saat ini termasuk sumber daya yang dimiliki, strategi pencapaian, serta ukuran keberhasilan. Agar penjabaran dokumen perencanaan strategis ini dapat terlaksana dengan baik dibutuhkan keterlibatan pimpinan instansi. Beberapa hal yang harus dilakukan oleh pimpinan instansi, sebagai berikut :
 - 1) UPT.BAKUDA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Wilayah Kabupaten Bangka telah melibatkan pimpinan secara langsung pada saat penyusunan perencanaan ;
 - 2) UPT.BAKUDA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Wilayah Kabupaten Bangka telah melibatkan secara langsung pimpinan saat penyusunan penetapan kinerja;
 - 3) Pimpinan telah memantau pencapaian kinerja secara berkala.
- b. Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja terdiri dari pengelolaan data kinerja, pengukuran kinerja, dan pelaporan kinerja. Untuk mengukur pencapaian program ini digunakan indikator di bawah ini :
 - 1)UPT.BAKUDA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Wilayah Kabupaten Bangka telah memiliki dokumen perencanaan ;
 - 2)Dokumen perencanaan telah berorientasi hasil ;
 - 3)Indikator kinerja telah memiliki kriteria Specific, Measurable, Acheivable, Relevant and Time bound (SMART);
 - 4)UPT.BAKUDA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Wilayah Kabupaten Bangka telah menyusun laporan kinerja tepat waktu ;
 - 5)Pelaporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja ;

- 6) UPT BAKUDA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Wilayah Kabupaten Bangka telah berupaya meningkatkan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja.

Target ;

- a. Meningkatnya kinerja UPT BAKUDA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Wilayah Kabupaten Bangka ;
- b. Meningkatnya akuntabilitas UPT BAKUDA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Wilayah Kabupaten Bangka .

V. Penguatan Pengawasan

Indikator ;

a. Pengendalian Gratifikasi

Pengukuran indikator ini dilakukan dengan mengacu pada kondisi yang seharusnya dilakukan, seperti :

- 1) UPT BAKUDA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Wilayah Kabupaten Bangka telah memiliki public campaign tentang pengendalian gratifikasi; dan
- 2) UPT BAKUDA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Wilayah Kabupaten Bangka telah mengimplementasikan pengendalian gratifikasi.

b. Penerapan Sistem Pengawasan Internal Pemerintah
Pengukuran indikator ini dilakukan dengan mengacu pada kondisi yang seharusnya dilakukan, seperti :

- 1) UPT BAKUDA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Wilayah Kabupaten Bangka telah membangun lingkungan pengendalian;
- 2) UPT BAKUDA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Wilayah Kabupaten Bangka telah melakukan penilaian risiko atas unit kerja;
- 3) UPT BAKUDA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Wilayah Kabupaten Bangka telah melakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi; dan
- 4) UPT BAKUDA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Wilayah Kabupaten Bangka telah mengkomunikasikan dan mengimplementasikan SPIP kepada seluruh pihak terkait.

c. Pengaduan Masyarakat

Pengukuran indikator ini dilakukan dengan mengacu pada kondisi yang seharusnya dilakukan, seperti :

- 1) UPT BAKUDA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Wilayah Kabupaten Bangka telah mengimplementasikan kebijakan pengaduan masyarakat baik melalui media cetak dan elektronik(website) ;
- 2) UPT BAKUDA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Wilayah Kabupaten Bangka telah melaksanakan tindak lanjut atas hasil penanganan pengaduan masyarakat ;

- 3) UPT BAKUDA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Wilayah Kabupaten Bangka telah melakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat ;
- 4) UPT BAKUDA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Wilayah Kabupaten Bangka telah menindaklanjuti hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat.

d. Whistle Blowing System

Pengukuran indikator ini dilakukan dengan mengacu pada kondisi yang seharusnya dilakukan, seperti :

- 1) UPT BAKUDA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Wilayah Kabupaten Bangka telah menerapkan whistle blowing system
- 2) UPT BAKUDA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Wilayah Kabupaten Bangka telah melakukan evaluasi atas penerapan whistle blowing system ;
- 3) UPT BAKUDA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Wilayah Kabupaten Bangka menindaklanjuti hasil evaluasi atas penerapan whistle blowing system.

e. Penanganan Benturan Kepentingan Pengukuran indikator ini dilakukan dengan mengacu pada kondisi yang seharusnya dilakukan, seperti :

- 1) UPT BAKUDA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Wilayah Kabupaten Bangka telah mengidentifikasi benturan kepentingan dalam tugas pelayanan ;
- 2) UPT BAKUDA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Wilayah Kabupaten Bangka telah melakukan sosialisasi penanganan benturan kepentingan ;
- 3) UPT BAKUDA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Wilayah Kabupaten Bangka telah mengimplementasikan penanganan benturan kepentingan ;
- 4) UPT BAKUDA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Wilayah Kabupaten Bangka telah melakukan evaluasi atas penanganan benturan kepentingan ;
- 5) UPT BAKUDA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Wilayah Kabupaten Bangka telah menindaklanjuti hasil evaluasi atas penanganan benturan kepentingan.

Target ;

- a. Meningkatnya kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan;
- b. Meningkatnya efektivitas pengelolaan anggaran UPT BAKUDA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Wilayah Kabupaten Bangka;
- c. Meningkatnya pelayanan;
- d. Meningkatnya kepuasan masyarakat.

VI. Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Indikator ;

a. Standar Pelayanan

Pengukuran indikator ini dilakukan dengan mengacu pada kondisi yang seharusnya dilakukan, seperti :

- 1) UPT BAKUDA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Wilayah Kabupaten Bangka memiliki Standar Pelayanan Minimal (SPM);
- 2) UPT BAKUDA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Wilayah Kabupaten Bangka telah memaklumkan standar pelayanan
- 3) UPT BAKUDA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Wilayah Kabupaten Bangka telah memiliki SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan ;
- 4) UPT BAKUDA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Wilayah Kabupaten Bangka telah melakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP.

b. Budaya Pelayanan Prima

Pengukuran indikator ini dilakukan dengan mengacu pada kondisi yang seharusnya dilakukan, seperti :

- 1) UPT BAKUDA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Wilayah Kabupaten Bangka telah memiliki sistem reward and punishment bagi seluruh pegawai upaya penerapan budaya pelayanan prima ;
- 2) UPT BAKUDA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Wilayah Kabupaten Bangka telah memiliki informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media sosial ;
- 3) UPT BAKUDA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Wilayah Kabupaten Bangka telah memiliki sarana layanan terpadu / terintegrasi ;
- 4) UPT BAKUDA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Wilayah Kabupaten Bangka telah melakukan inovasi pelayanan berupa pelayanan samsat keliling dan loket khusus ;

c. Penilaian Kepuasan Terhadap Pelayanan

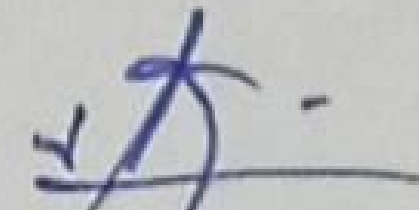
Pengukuran indikator ini dilakukan dengan mengacu pada kondisi yang seharusnya dilakukan, seperti :

- 1) UPT BAKUDA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Wilayah Kabupaten Bangka telah melakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan ;
- 2) Hasil survey kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka
- 3) UPT BAKUDA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Wilayah Kabupaten Bangka telah melakukan tindak lanjut atas hasil survey kepuasan masyarakat.

Target ;

- a. Meningkatnya kualitas pelayanan publik (lebih cepat, lebih aman, dan lebih mudah dijangkau) pada instansi pemerintah ;
- b. Meningkatnya jumlah perorangan atau perusahaan membayar pajak;
- c. Meningkatnya indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan.

**KEPALA UPT BAKUDA
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
WILAYAH KABUPATEN BANGKA**



**YERI, S. Sos
PEMBINA TK I
NIP. 19641213 198603 1 011**